



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

NOMOR : 097 / Kpts / KPU-SLG-012.329537 / 2011

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan audit dana kampanye peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, perlu adanya auditor;
 - b. bahwa untuk adanya auditor pelaksana audit dana kampanye, perlu ditetapkannya Kantor Akuntan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 01/Kpts/KPU-KOTA SLG-012.329537/2010 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 022/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 04/Kpts/KPU-KOTA SLG-012.329537/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011;

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 099 / BA / IV / 2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

KEDUA : Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Kantor Akuntan Publik (KAP) "RUCHENDI, MARDJITO & RUSHADI"

Nama Akuntan : Drs. Rushadi, Ak.

Jabatan : Rekan Pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) "RUCHENDI, MARDJITO & RUSHADI"

Alamat : Jl. Beruang Raya No.48 Salatiga

Untuk Mengaudit Paslon : DIHATI dan POROS

b. Kantor Akuntan Publik (KAP) "DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO"

Nama Akuntan : Drs. Darsono

Jabatan : Pemimpin Rekan Kantor Akuntan Publik (KAP) "DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO"

Alamat : Jl. Mugas Dalam No.65 Semarang 50241

Untuk Mengaudit Paslon : YARIS dan BASIS

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada Tanggal 8 April 2011

KETUA,

Ttd

SURYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga

Kasubbag Hukum

LILIK AGUNG PRAYITNO K., SH

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta ;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, di Semarang;
3. Walikota Salatiga;
4. DPRD Kota Salatiga;
5. Panwaskada Kota Salatiga.